

**DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN
TINDAK LANJUT PENYUSUNAN
REPRESENTASI NUSANTARA; KAJIAN BUDAYA DAN SOSIAL
DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN)
DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Tim Kajian Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental,
Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga**



KEMENKO PMK

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Rabu, 12 Oktober 2022

Agenda

1



Pendahuluan

2



Pelaksanaan

3



Pembahasan dan Hasil Temuan
Sementara

GERAKAN NASIONAL
Revolusi Mental
#AYOBERUBAH Etos kerja • Gotong royong • Integritas

Pendahuluan

Latar Belakang, Tujuan, Kebaharuan,
Rumusan Masalah, dan Metodologi



KEMENKO PMK

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Tim Kajian



Jazziray Hartoyo

Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
Ketua Tim



Hikmah Rafika Mufti

Analisis Kebijakan Ahli Muda



Usman Manor

Analisis Sumber Sejarah



Wahyu Sujatmoko

Analisis Nilai Budaya



Wahyu Hidayat

Tenaga Ahli Gugus Tugas Nasional
Revolusi Mental

Pasca Pidato Kenegaraan mengenai Perpindahan Ibu Kota Negara yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2019, berbagai upaya dilakukan untuk mengimplementasikan rencana perpindahan tersebut. Dasar Hukum pemindahan Ibu Kota berikut dengan perencanaannya pun disusun melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Ibu Kota Nusantara, dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042. Disamping itu, berbagai kajian pun disusun, terutama mengenai ekonomi dan infrastruktur

Perlunya Peneletian Komprehensif



Berdasarkan Kunjungan Kerja dan Dialog Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan masyarakat pada 5-6 September 2022 di Ibu Kota Nusantara, terdapat berbagai permasalahan budaya dan sosial yang perlu untuk segera diselesaikan. Selain itu, kajian mengenai aspek budaya dan sosial di Ibu Kota Nusantara pun belum banyak diteliti sehingga diperlukan kajian yang komprehensif dan sistematis.



Cakupan Wilayah

Ibu Kota Nusantara mencakup wilayah daratan dengan luas 256.142 hektar dan wilayah lautan seluas 68.189 hektar, meliputi Kecamatan Sepaku seluas 92.718,15 hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi: sebagian Kecamatan Loakulu seluas 24.888,35 hektar, sebagian Kecamatan Loa Janan seluas 33.093,54 hektar, Kecamatan Muara Jawa seluas 32.131,11 hektar, serta Kecamatan Samboja seluas 71.745,40 hektar.

Lima Isu Utama



Dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dijelaskan bahwa, terdapat lima isu utama keterlibatan masyarakat yang telah menjadi pedoman dalam konsep sosial, yaitu: 1) **Penyelesaian masalah tenurial**; 2) **Pelestarian nilai, adat, dan budaya lokal untuk ketahanan kebhinekaan Indonesia**; 3) Prioritas pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); 4) Pengembangan infrastruktur yang masih minim; serta 5) Penyelesaian kepatuhan lingkungan.



Tujuan

Tujuan umum kajian budaya dan sosial dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, yaitu:

- a. memperoleh gagasan mengenai permasalahan budaya dan sosial masyarakat di Ibu Kota Nusantara,
- b. memperoleh informasi terkini mengenai persepsi masyarakat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara,
- c. memetakan permasalahan budaya dan sosial masyarakat Ibu Kota Nusantara,
- d. menggali potensi budaya dan sosial masyarakat Ibu Kota Nusantara, serta
- e. melakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait pemajuan dan pelestarian kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.



2

Tujuan spesifik dari kajian dimaksud adalah memetakan potensi dan permasalahan berdasarkan saran maupun masukan dari masyarakat dalam sudut pandang budaya dan sosial sebagai acuan dalam penyusunan Rekomendasi Kebijakan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Presiden.

Hasil kajian berbasis budaya dan sosial akan menjadi alternatif kebijakan yang menguatkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menyejahterakan masyarakat. Konsep dan gagasan yang terdapat dalam naskah akademik maupun peraturan mengenai Ibu Kota Nusantara akan menjadi landasan penelitian sekaligus alat kontrol terhadap hasil temuan dan *gap* di lokasi penelitian.

Kebaharuan Penelitian dan Analisa

Penelitian menawarkan kebaruan dari sisi subjek penelitian, perspektif analisis, dan pendekatan. Dalam penelitian, “efektivitas” ide Pembangunan Ibu Kota Negara berusaha digali melalui pemetaan berbagai permasalahan budaya dan sosial. Selain itu, melalui penelitian ini konsep dan ide mengenai budaya dalam naskah kajian akademik mengenai Ibu Kota Nusantara berupaya digali melalui wawancara mendalam berdasarkan persepsi Pemerintah Daerah, Komunitas Adat, Akademisi, dan Masyarakat dengan pendekatan integratif-kolaboratif

Pada dasarnya terdapat 22 Komunitas Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Lokasi Ibu Kota Nusantara (*Sumber: Deputi Sekjen AMAN*). Komunitas tersebut dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser

Dari berbagai komunitas tersebut, terdapat Masyarakat Adat di Kelurahan Mentawir merupakan bagian (cabang) dari Masyarakat Adat yang ada di Kecamatan Sepaku. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Mentawir merupakan suku dari adat Paser dan Bugis. Selain itu, terdapat pula Dusun Adat Putak adalah Dusun wisata Budaya dan alam yang terletak di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan Kab Kutai Kartanegara



Penduduk Dusun Putak adalah Suku Dayak Tunjung Benuaq dan memiliki beberapa lokasi wisata berbasis adat seperti Wisata Batu Dinding "Batu Dinding Tapa", Wisata Jantur (Air Terjun) "Jantur Bukit Sekilo", dan Wisata Religi "Kawasan Goa Maria Bukit Rahmat". Dusun Adat Putak juga memiliki tradisi budaya wisata seperti Pentas Seni Tari Dayak Tunjung-Benuaq, Workshop kerajinan tangan Sulam Tumpar yang dilakukan di Lamin Adat Dusun Putak, Upacara adat dilaksanakan pada waktu tertentu dan event tahunan seperti Festival Panen Padi Gunung dan Nutuq Baham yang dilaksanakan setiap tahun



Rumusan Masalah

“

Penelitian ini memiliki rumusan masalah budaya dan sosial dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

”

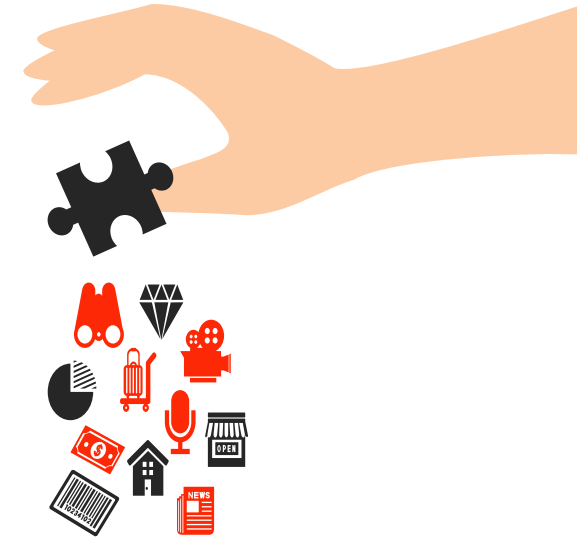
- Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yang mengakomodir aspek budaya dan sosial masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur?
- Apa saja potensi dan kekuatan modal sosial dan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur?
- Apa rekomendasi kebijakan yang dapat mengakomodir potensi budaya dan sosial masyarakat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara?

Metodologi dan Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif. Untuk melakukan penggalian data dan analisis, peneliti menggunakan metode diskusi terpumpun dengan pemerintah daerah dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan masyarakat. Informan utama dalam bagian penelitian ini adalah masyarakat terdampak pembangunan di kawasan IKN, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan pemerintah daerah. Untuk melengkapi hasil temuan, diskusi dengan akademisi pun perlu dilakukan selain menggunakan acuan berupa studi literatur.

Penentuan responden yang diteliti menggunakan metode *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diambil untuk melakukan kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder

METODE	URAIAN KEGUNAAN
Penggunaan kuisiонер, survei dan penggunaan <i>check-list</i>	Untuk pengambilan data secara cepat dalam jumlah banyak dengan mengandalkan asumsi ketidakterancaman sumber data jika mereka menyampaikan data
Wawancara	Untuk mendalami data berdasarkan kesan, pengalaman responden dan mendalami jawaban responden terhadap kuisiонер
Observasi	Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kebijakan/pemberdayaan yang dijalankan, terutama menyangkut proses
Studi Dokumentasi	Untuk mengetahui kinerja stakeholder/pemangku kepentingan implementasi kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur



GERAKAN NASIONAL
Revolusi Mental
#AYOBERUBAH Etos kerja • Gotong royong • Integritas

Pelaksanaan

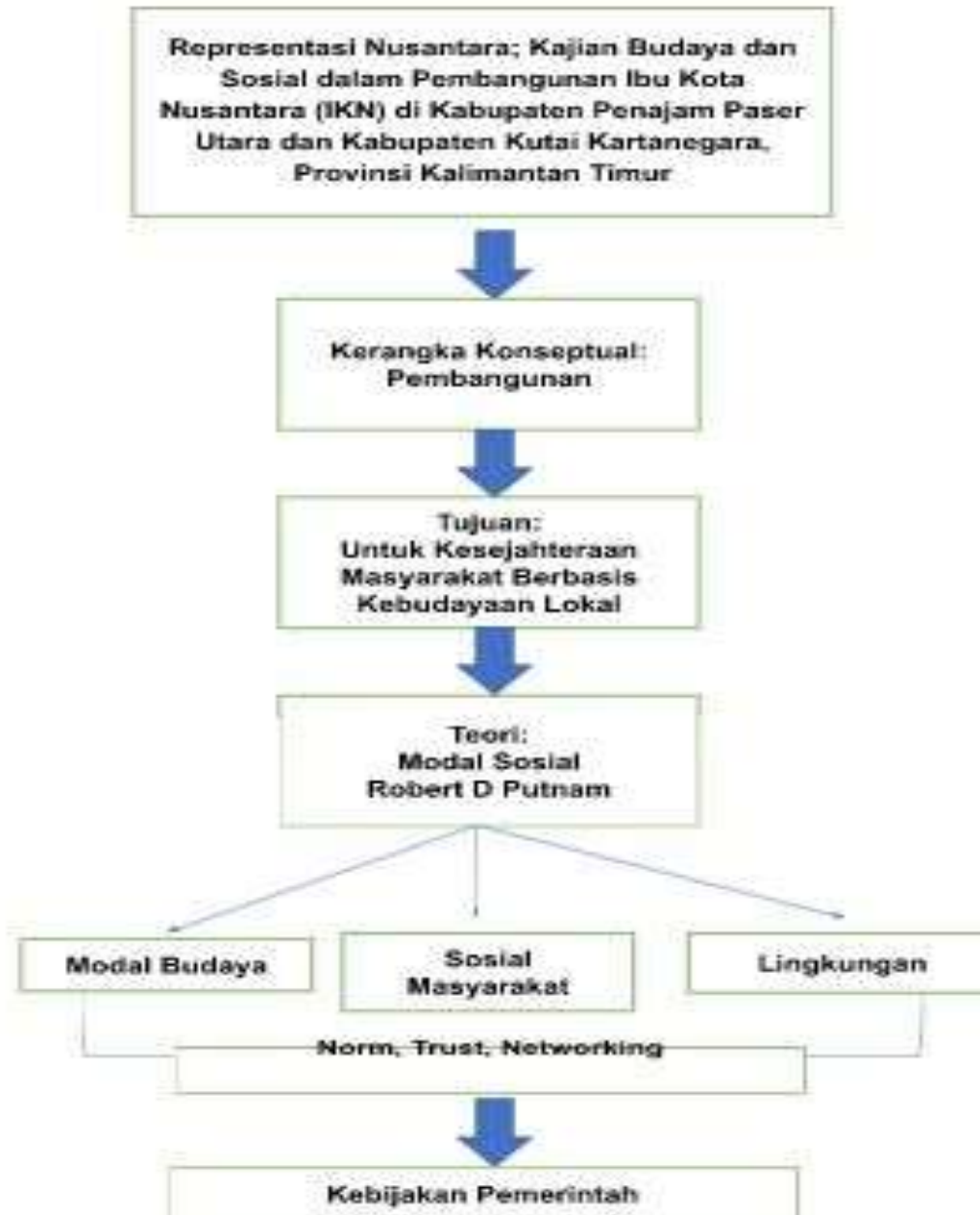
Kerangka Berpikir, Faktor Risiko, Aspek
yang Diteliti, dan Lini Masa Penelitian



KEMENKO PMK

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

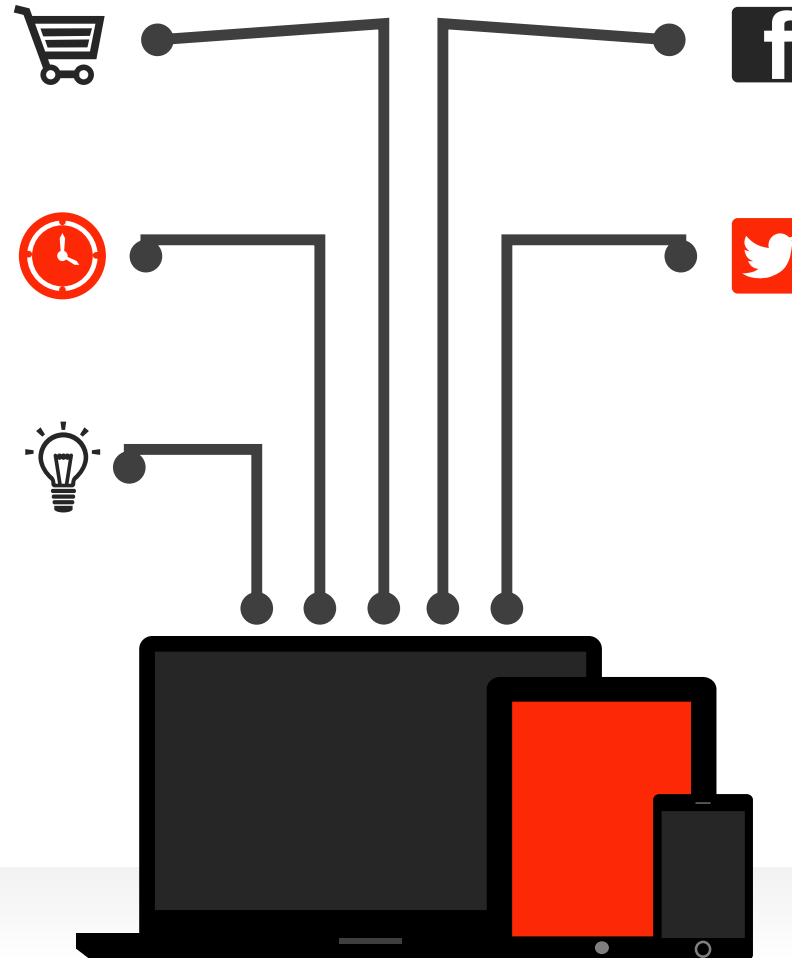


Faktor Risiko dan Keberhasilan

Topik budaya dan sosial dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan prioritas pemerintah dan menjadi perhatian Kementerian/Lembaga terkait sehingga menambah peluang bagi penelitian.

Minat masyarakat yang luas dan momentum topik Ibu Kota Nusantara yang actual karena sedang menjadi agenda pemerintah. Topik ini juga menjadi pembicaraan di masyarakat, dan bahan pengamatan para pengamat sehingga memberi peluang diseminasi dan kemanfaatan yang luas.

Pandemi Covid-19 yang telah mereda menjadi momentum untuk melakukan penelitian. Adapun faktor bagi kemungkinan kegagalan penelitian ini adalah terkait kebijakan anggaran yang tidak dapat diprediksi dan dipastikan pada situasi pandemi ini sehingga kebijakan *refocusing* anggaran berdampak pada kuantitas target capaian dan kualitas performa penelitian.



Kebutuhan data terkait topik ini yang sangat dibutuhkan pemerintah, baik dalam konteks perwujudan penyelesaian permasalahan budaya dan sosial mengacu pada UU Pemajuan Kebudayaan dan UU Cagar Budaya.

Sumber daya yang mencukupi untuk menjadi informan pendukung dalam topik ini dari kalangan Kemenko PMK.

Aspek yang Diteliti, Indikator, dan Sumber Data

No	Aspek yang diteliti	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Kebijakan pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yang mengakomodir aspek budaya dan sosial masyarakat	a. Kebijakan/produk hukum tentang kebudayaan lokal b. Pelaksanaan/implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara c. Permasalahan dan kebijakan yang dihadapi	1. Badan Otorita IKN 2. Pemkab 3. Bappeda 4. Sekda Provinsi	1. Dokumentasi 2. FGD
2	Kelembagaan Masyarakat Adat	a. Kelembagaan, kewenangan, dan fungsi lembaga masyarakat adat b. Kepercayaan masyarakat adat c. Norma masyarakat adat d. Jaringan masyarakat adat	1. Badan Otorita IKN 2. Pengurus Masyarakat Adat 3. Pejabat di Kesbangpol 4. Kepala Desa	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
3	Pelaksanaan Pembangunan Berbasis pada aspek sosial dan budaya	a. Potensi Budaya Lokal b. Pergerakan dan konektifitas c. Manajemen kebudayaan d. Alokasi pembangunan bidang kebudayaan e. Keamanan dalam aktivitas sehari-hari	1. Badan Otorita IKN 2. Bappeda 3. Dispar 4. Disbud 5. Disdik 6. Pejabat desa 7. Pengurus Adat 8. Masyarakat	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi 4. FGD
4	Pemberdayaan masyarakat	a. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi masyarakat dalam melestarikan budaya lokal b. Motivasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang kebudayaan lokal c. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal d. Pertunjukan seni sebagai sumber penghasilan	1. Bappeda 2. Dispar 3. Pejabat Desa 4. Pengurus adat 5. Masyarakat	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi 4. FGD
5	Pengawasan dan Inovasi Kawasan	a. Pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Lokal b. Inovasi dalam pengembangan kebudayaan lokal	1. Bappeda 2. Disbud 3. Pejabat Desa 4. Masyarakat	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi 4. FGD

Pelaksanaan Penelitian

No	Rencana	September				Oktober												
			28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Riset Desain (KAK/Proposal)																	
2	Literatur Review dan Diskusi Internal																	
3	Persiapan Teknis Penelitian																	
4	Tim tiba di Lokasi Penelitian																	
5	FGD awal dengan stakeholder																	
6	Audiensi dengan pemerintah daerah																	
7	Penelitian Lapangan																	
8	Analisis dan penulisan																	
9	FGD akhir																	
10	Draf Laporan Akhir																	
11	Tim Kembali ke Jakarta																	

GERAKAN NASIONAL
Revolusi Mental
#AYOBERUBAH Etos kerja • Gotong royong • Integritas

Pembahasan dan Hasil Temuan Sementara



KEMENKO PMK

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



Cagar Budaya

Pelindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda sebagai khazanah budaya bangsa.



Talenta

Peningkatan kualitas talenta seni budaya berkelas internasional.



Khazanah Budaya

Pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.



Pendokumentasian

Pendokumentasian arsip pandemi COVID-19 untuk pembelajaran generasi mendatang dalam memahami dampak pandemi dan langkah penanganannya.

Cagar Budaya

Pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, serta revitalisasi jalur rempah dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berbasis kebudayaan.

Talenta

Revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya sebagai pusat pengembangan talenta seni budaya, termasuk pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak terpakai untuk kegiatan seni budaya.

Arah Kebijakan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Tahun 2022

Khazanah Budaya

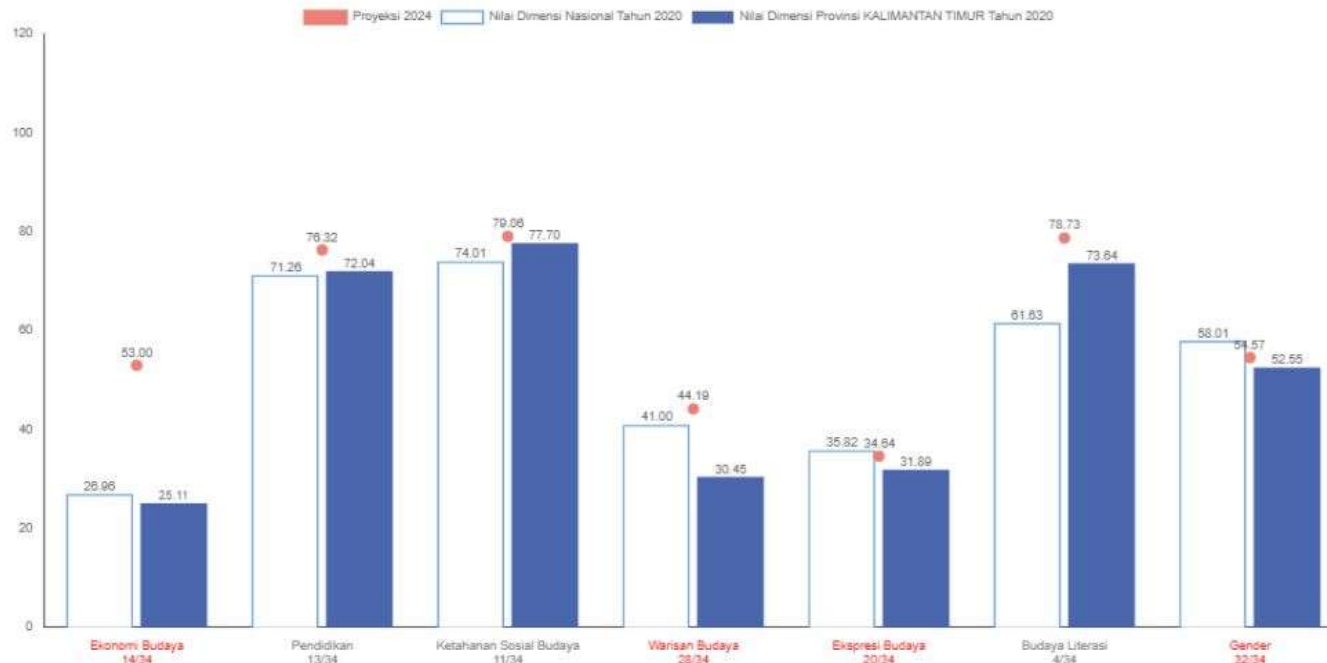
Perluasan bantuan sosial untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif, terutama yang terdampak COVID-19, untuk melakukan kegiatan kebudayaan.

Pendokumentasian

Pengembangan media baru berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memperluas wahana ekspresi budaya.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Kode	Nama Dimensi	2018	2019	2020
D1	Ekonomi Budaya	26.60	32.86	25.11
D2	Pendidikan	73.85	76.04	72.04
D3	Ketahanan Sosial Budaya	76.82	77.44	77.70
D4	Warisan Budaya	29.96	34.46	30.45
D5	Ekspresi Budaya	33.86	33.21	31.89
D6	Budaya Literasi	66.13	70.69	73.64
D7	Gender	49.99	49.73	52.55
IPK Provinsi		52.78	55.47	53.25



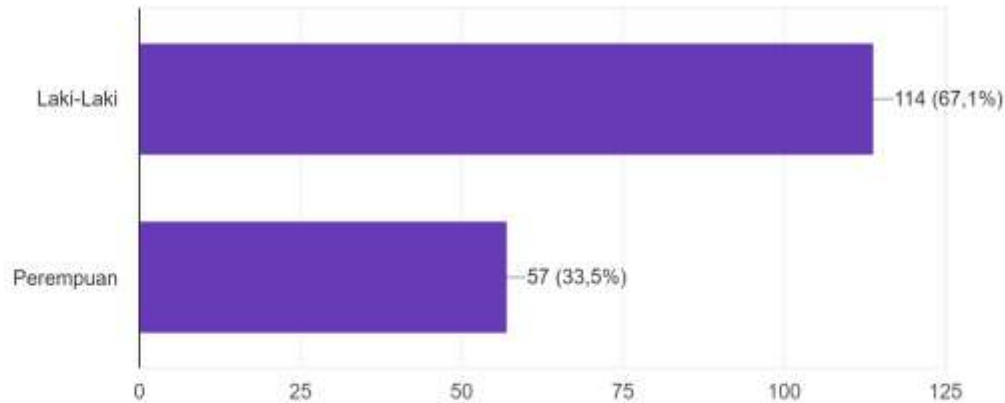
Tahun	Nasional	KALIMANTAN TIMUR
2018	53.74	52.78
2019	55.91	55.47
2020	54.65	53.25

Dimensi		Nilai Indeks		
		2018	2024 Rekomendasi BPS	2024 Kesepakatan
1	Ekonomi Budaya	30,55	30,6	50,0
2	Pendidikan	69,67	72,5	72,3
3	Ketahanan Sosial Budaya	72,84	76,0	76,0
4	Warisan Budaya	41,11	57,6	57,6
5	Ekspresi Budaya	36,57	39,0	39,0
6	Budaya Literasi	55,03	77,8	71,0
7	Gender	54,97	55,9	55,7
Nilai IPK		53,74	61,6	62,7

IPK Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 masih di bawah IPK Nasional sehingga diperlukan sinergi lintas OPD Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang dikolaborasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong peningkatan IPK Provinsi Kalimantan Timur yang menunjang peningkatan IPK Nasional.

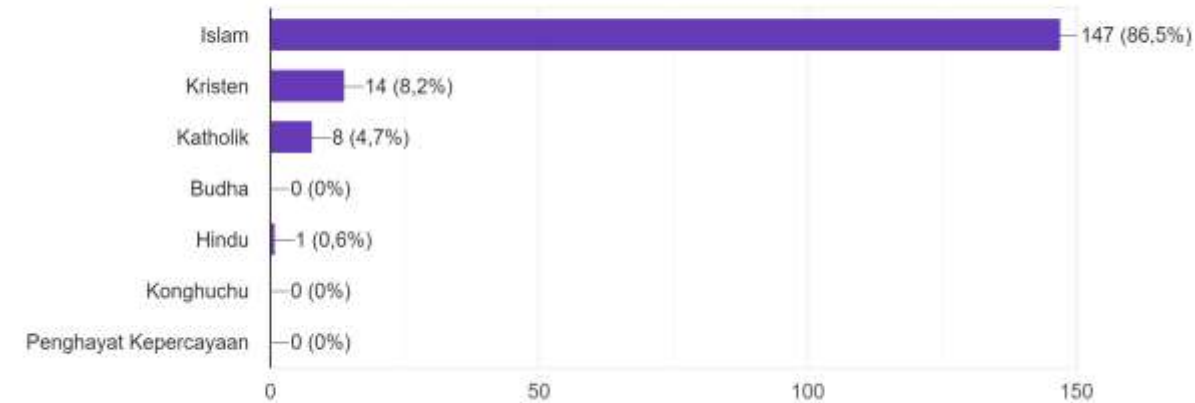
Jenis Kelamin

170 jawaban



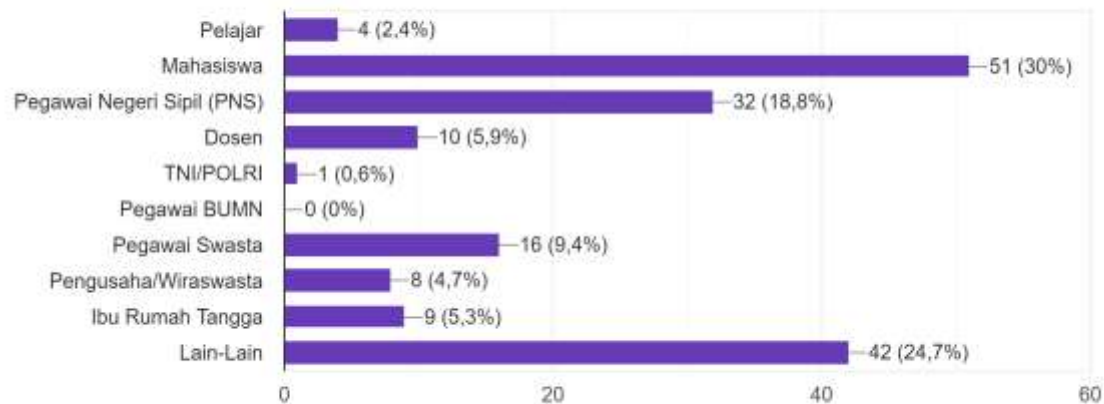
Agama

170 jawaban



Pekerjaan

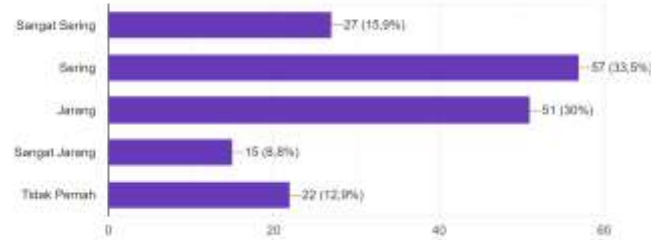
170 jawaban



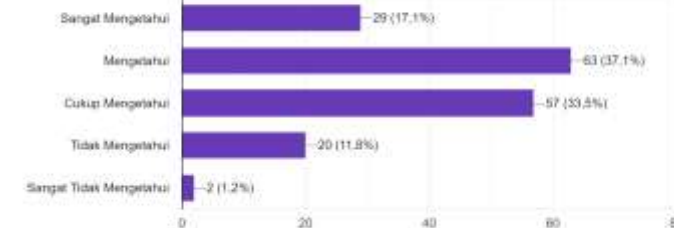
Untuk mendukung hasil temuan pada wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian, Tim juga menyebarkan Kuesioner secara Online melalui *Google Form*. Kuesioner tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur, terutama Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 30 pertanyaan dengan waktu pengisian sekitar 2-3 menit. Sampai dengan pukul 00.00 WITA, Rabu 12 Oktober 2022, telah terjaring 194 responden.

Hasil Sementara Survei Online (1)

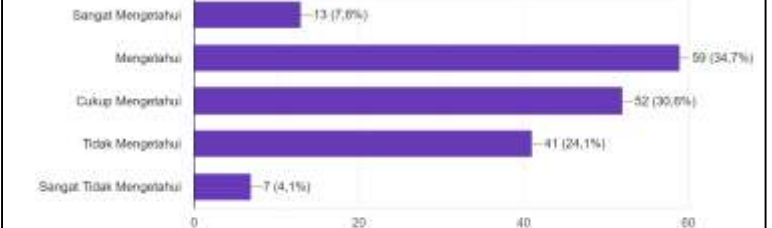
1. Apakah Anda terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni/budaya di Kalimantan Timur?
170 jawaban



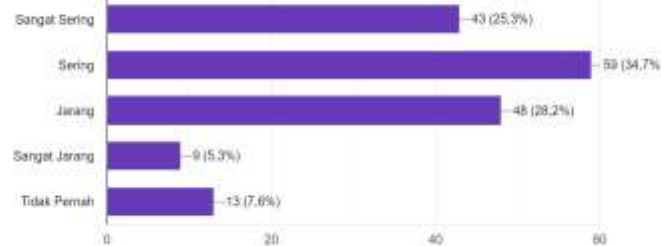
2. Apakah anda mengetahui benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya (Heritage) di Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kabupaten Kutai Kartanegara?
170 jawaban



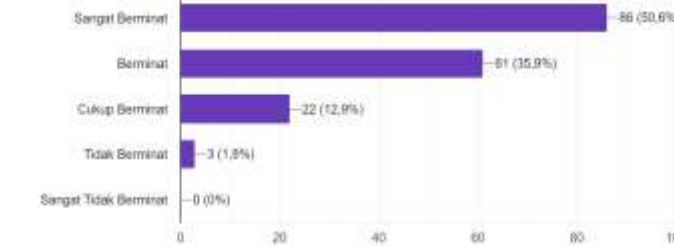
3. Apakah anda mengetahui Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kabupaten Kutai Kartanegara ?
170 jawaban



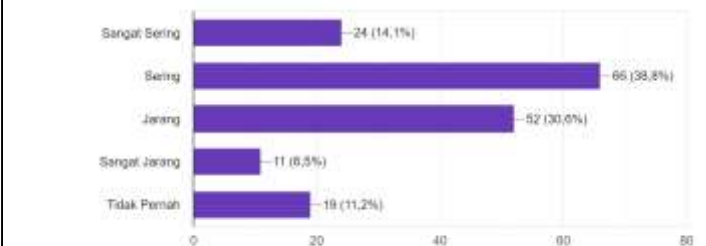
4. Apakah anda menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari?
170 jawaban



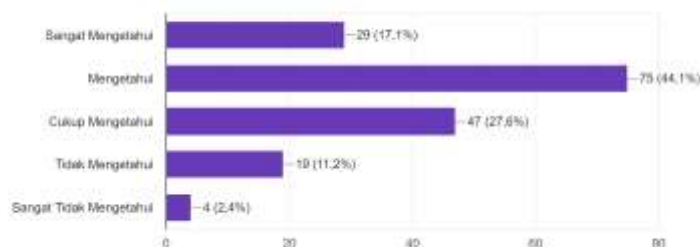
5. Apakah anda berminat menonton secara langsung pertunjukan seni khas Kalimantan Timur?
170 jawaban



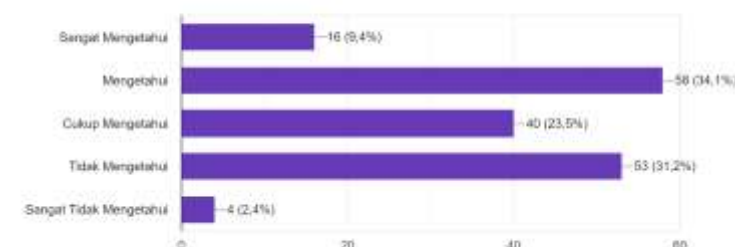
6. Apakah anda mengunjungi peninggalan sejarah atau warisan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kabupaten Kutai Kartanegara?
170 jawaban



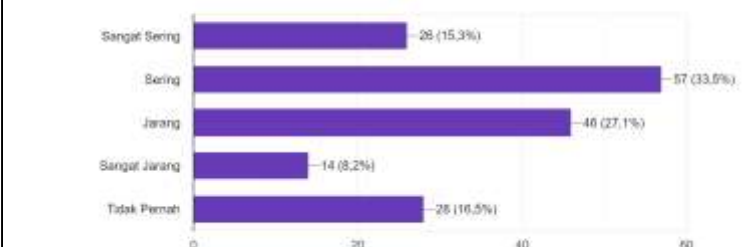
7. Apakah anda mengetahui produk khas atau produk tradisional di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kabupaten Kutai Kartanegara?
170 jawaban



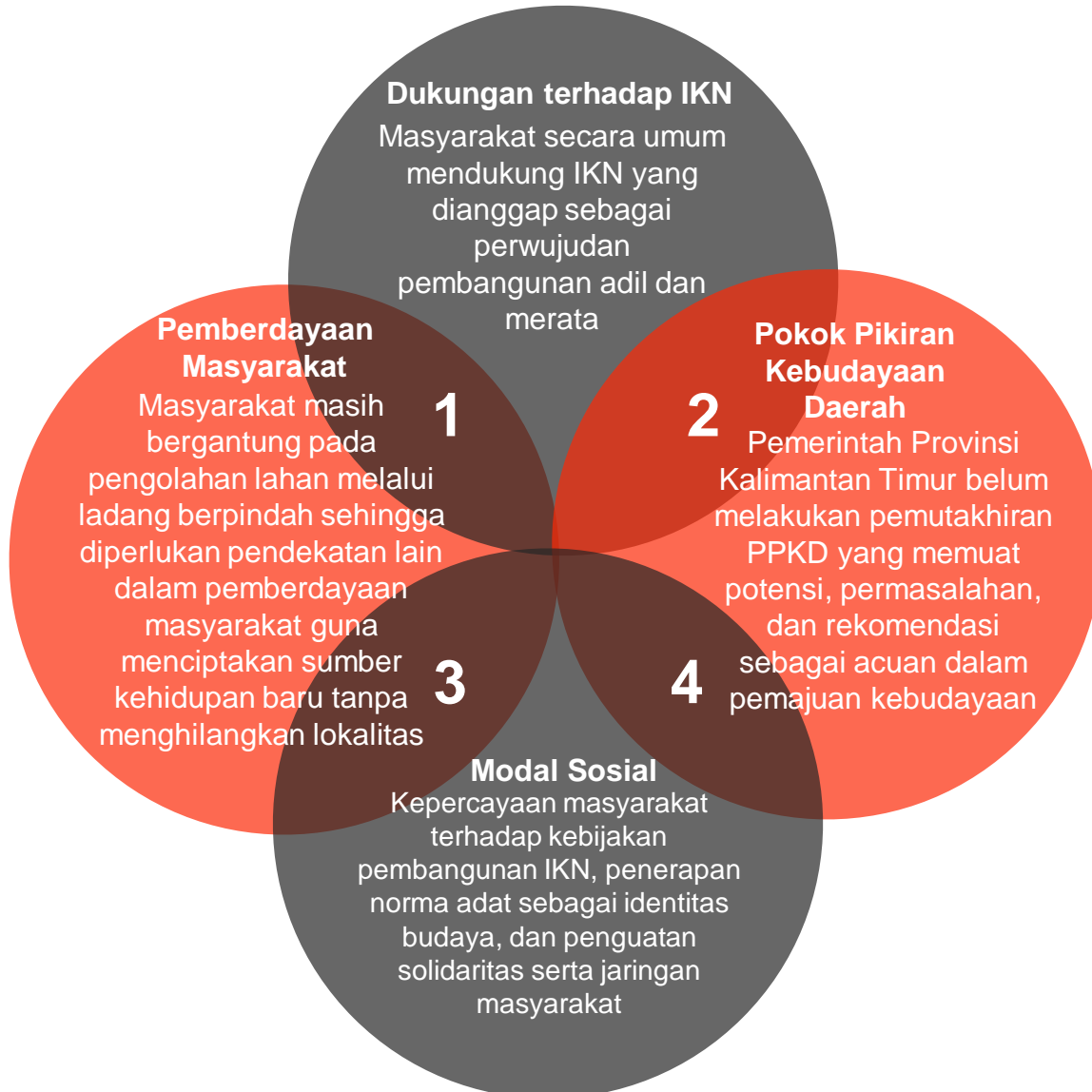
8. Apakah anda mengetahui tentang kegiatan diskusi, rapat, atau pertemuan adat diselenggarakan?
170 jawaban



9. Apakah anda berkontribusi dalam merawat budaya, seni, tradisi, dan kearifan lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kabupaten Kutai Kartanegara?
170 jawaban



Hasil Temuan Sementara



Usulan Rekomendasi Sementara

Pendidikan

- Pemberian beasiswa afirmasi yang diperuntukkan bagi masyarakat lokal yang terdampak pembangunan IKN;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas guru/tenaga pendidik pada bidang muatan lokal melalui sertifikasi pendidikan.

Kebudayaan

- Pemetaan Kebudayaan dan penggunaan bahasa lokal pada ruang publik di IKN;
- Pembangunan etalase kebudayaan atau pusat kebudayaan;
- Penyusunan lokalisasi wilayah adat di sekitar kawasan IKN sebagai upaya mempertahankan identitas sosial dalam pembangunan kebudayaan.

Sosial

- Pemutakhiran data dari Kemen PPN/Bappenas mengenai wilayah IKN untuk meminimalisir potensi konflik terkait lahan;
- Pengimplementasian kebijakan afirmatif terkait permasalahan tenurial agraria dalam upaya menjaga kearifan lokal masyarakat dalam mengolah lahan (ladang berpindah).

Ketenagakerjaan

- Pemetaan dan kajian potensi lokal masyarakat dengan harapan dapat memperoleh gambaran untuk intervensi program;
- pelatihan bagi masyarakat lokal dalam skala besar sebagai bentuk penguatan sumber daya manusia dalam berbagai bidang untuk menunjang pembangunan IKN.

Ekonomi

- Pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat melalui kolaborasi dalam pelestarian lingkungan, dengan cara menanam tanaman konversi selain sawit yang memiliki nilai jual tinggi atau tanaman pangan untuk menjaga ketahanan pangan.
- Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi yang terintegrasi antara kawasan IKN dan kawasan penyangga.

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32;
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum;
 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022-2042

Wawancara

Aji Qamara Hakim	Adi Rahman
Bahron Osik	Chai Siswandi
Dora	Edito Hermanto
Erika Siluq	Hasanudin
Hamtolius	Ida Rusintan
Ketut Gunawan	M. Benny
Martin	Muslimin
Paidah Riansyah	Suwis
Wendi	Lukas Nay
Sukapti	Yossy Samban

Jurnal

Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 149-164.

Aziz, N. L. L. (2020). Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned dari Negara Lain. *Jurnal Kajian Wilayah*, 10(2), 37-64.

Budiarta, I. W. (2019). Eksistensi Bahasa Lokal Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur: Ancaman dan Strategi Pemertahanannya. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2-2), 1-9.

Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1-30.

Irharni, I., & Farhana, V. (2020). PERAN DAN FUNGSI PERPUSTAKAAN NASIONAL DI IBU KOTA NEGARA BARU KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *VISI PUSTAKA: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan*, 22(2), 141-150.

Junaidi, J. (2022). Menghindari Konflik Berkomunikasi: Analisis Kebahasaan, Ilmu Komunikasi dan Kewarganegaraan dalam Kasus Ibu Kota Negara Baru yang Disebutkan "Tempat Jin Buang Anak". *KONTEKSTUAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 45-55.

Katharina, R. KEBERLANJUTAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU PADA MASA PANDEMI.

Lantigimo, E. M., Sasirais, I., & Yohaness, G. T. (2022). Kesiapan Dayak Deah Di Desa Kinarum Dalam Menyambut Ibu Kota Negara Baru. *Jurnal Teologi Pabelum*, 2(2), 34-48.

Mardika, I. M. (2019). Warisan Budaya sebagai Ikon Pariwisata dalam Rangka Kalimantan Timur Menjadi Ibukota Negara. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2-2), 57-62.

Mazda, C. N. (2022). Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 6(1), 1-12.

Nugroho, H. (2020). Pemindahan Ibu Kota Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Kalimantan Timur: Strategi Pemenuhan Kebutuhan dan Konsumsi Energi. *Bappenas Working Papers*, 3(1), 33-41.

Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 3(1), 1-12.

Ridhani, M. Y., Ridhoni, M., & Priyadharma, A. A. (2021). Isu Strategis Terkait Transportasi dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru. *SPECTA Journal of Technology*, 5(3), 247-260.

Safra, I. A., & Zuliarso, E. (2020). Analisa sentimen persepsi masyarakat terhadap pemindahan ibukota baru di kalimantan timur pada media sosial twitter.

Salsabila, A. H., & Nurwati, N. (2020). Deforestasi Dan Migrasi Penduduk Ke Ibu Kota Baru Kalimantan Timur: Peran Sinergis Pemerintah Dan Masyarakat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 27-39.



KEMENKO PMK

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

GERAKAN NASIONAL *Revolusi Mental*

#AYOBERUBAH Etos kerja • Gotong royong • Integritas

TERIMA KASIH

“Kebudayaan pada dasarnya tidak bersifat statis, tapi dinamis, dan harus bisa merespons perkembangan yang ada. Budaya harus selalu diberi muatan yang baru agar selalu segar dan mengikuti zaman”

(Muhadjir Effendy)